

PERAN PEMERINTAH DALAM PENGENDALIAN PERTUMBUHAN PENDUDUK DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2019

Oleh: DHEA AYURI

Email:

Dosen Pembimbing:

Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau
Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simpang Baru Panam,
Pekanbaru 28293 Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRAK

Menurut Undang Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, social budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana peran pemerintah dalam pengendalian penduduk di Kota Pekanbaru, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pemerintah dalam pengendalian penduduk di Kota Pekanbaru dan apakah peran pemerintah sangat membantu dalam pengendalian penduduk di Kota Pekanbaru.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah dalam menyelesaikan masalah pengendalian penduduk di Kota Pekanbaru. Selain itu penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data pengamatan (observasi), interview (wawancara) dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini adalah Peran pemerintah Kota Pekanbaru melalui Disdalduk KB sudah baik, karena program-program yang dijalankan oleh Disdalduk KB telah bisa menekan pertumbuhan penduduk yang terjadi di Pekanbaru yang tidak sampai pada tiga (3) persen setahun. Pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Disdalduk KB dalam hal ini terhambat oleh pandemi yang dirasakan hampir seluruh dunia, penyuluhan merupakan ujung tombak Disdalduk KB dalam penyampaian program nasional, dan hambatan tersebut juga terkait dengan dokter dan bidan yang mengurangi pasien pada masa pandemi ini. Peran pemerintah dalam menekan laju pertumbuhan penduduk cukup baik, dapat dilihat dari lonjakan penduduk yang pada umumnya masyarakat kita tidak mempunyai anak yang banyak karena melalui program-program yang dilakukan oleh pemerintah.

Kata Kunci: Peran Pemerintah, Pengendalian, Pertambahan Penduduk dan Kota Pekanbaru

THE ROLE OF THE GOVERNMENT IN CONTROL OF POPULATION GROWTH IN PEKANBARU CITY IN 2019

By: DHEA AYURI

Email:

Advisor:

Department of Governmental Science, Social and Political Sciences, Riau University, Bina Widya Campus, Jl. HR Soebrantas Km 12.5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293 Tel / Fax. 0761-63277

ABSTRACT

According to Law Number 52 of 2009 concerning Population Development and Family Development, population is matters related to the number, structure, growth, distribution, mobility, distribution, quality, and welfare conditions relating to politics, economy, socio-culture, religion and neighborhood of the local population. The formulation of the problem in this study is how the role of government in controlling population in Pekanbaru City, what are the factors that influence the government in controlling population in Pekanbaru City and whether the government is very helpful in controlling population in Pekanbaru City.

This study aims to determine the role of the government in solving population control problems in Pekanbaru City. In addition, this study uses a qualitative approach and data collection techniques are observations (observations), interviews (interviews) and documentation.

The result of this research is that the role of Pekanbaru City government through Disdalduk KB is already good, because the programs run by Disdalduk KB have been able to suppress population growth that occurs in Pekanbaru which does not reach three (3) percent a year. Implementation carried out by Disdalduk KB in this case is hampered by a pandemic that is felt almost all over the world, counseling is the spearhead of Disdalduk KB in the delivery of national programs, and these obstacles are also related to doctors and midwives who reduce patients during this pandemic. The role of the government in suppressing the rate of population growth is quite good, it can be seen from the population spike which in general our society does not have many children because of the programs carried out by the government.

Keywords: *Role of Government, Control, Population and City Growth Pekanbaru*

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai populasi pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi. Indonesia berada pada posisi ke empat jumlah penduduk terbanyak di dunia, dengan jumlah penduduknya sebanyak 237,6 juta jiwa. Dengan jumlah penduduk yang semakin besar ini tentu membawa tantangan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, menciptakan kesempatan kerja, menghilangkan kemiskinan, meningkatkan mutu pendidikan dan kesehatan, meningkatkan infrastruktur, dan pelayanan public. Disdalduk-KB adalah salah satu lembaga pemerintah yang mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dengan landasan hukum PERGUB No.75 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kependudukan, pencatatan sipil dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana Provinsi Riau. Upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk terus dilakukan oleh Disdalduk-KB Pekanbaru sehingga laju pertumbuhan penduduk dapat diturunkan dari waktu ke waktu. Laju pertumbuhan penduduk Kota Pekanbaru bisa dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 1.1

Jumlah Penduduk Dan Laju Pertambahan Penduduk Di Kota Pekanbaru Tahun 2019

No	Kecamatan	Penduduk (Ribuan)	Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun (%) 2018-2019
1	Tampian	191,910	6,24
2	Payung Sekaki	94,965	4,27
3	Bukit Raya	93,337	2,35

4	Marpoyan Damai	130,303	3,32
5	Tenayan Raya	136,448	5,24
6	Limapuluh	43,461	2,59
7	Sail	23,285	2,41
8	Pekanbaru Kota	26,645	3,14
9	Sukajadi	47,672	2,93
10	Senapelan	38,292	1,78
11	Rumbai	68,451	7,00
12	Rumbai Pesisir	69,604	2,73
Hasil Registrasi		954,373	4,20
Hasil Proyeksi		1149,359	2,86

Sumber: Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru

Berdasarkan tabel di atas penduduk Kota Pekanbaru pada tahun 2019 bersumber dari hasil registrasi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil adalah 954.373 jiwa, sedangkan berdasarkan hasil proyeksi penduduk oleh Badan Pusat Statistik adalah 1.149.359 jiwa. Jumlah penduduk jika dirinci menurut kecamatan, terlihat bahwa Kecamatan Tampian, Tenayan Raya, dan Marpoyan Damai adalah wilayah dengan jumlah paling banyak. Sedangkan menurut persentase laju pertambahan penduduk Kecamatan Rumbai, Tampian dan Tenayan raya yang memiliki persentase paling tinggi dalam pertambahan penduduk, Sedangkan jumlah penduduk yang pindah dan datang ke kota Pekanbaru pada tahun 2019 bisa dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 1.2

Jumlah Penduduk Yang Pindah Dan Datang Antar Kabupaten/Kota Per Kecamatan Di Kota Pekanbaru Tahun 2019

No	Kecamatan	Pindah		Datang	
		L	P	L	P
1	Tampian	239	222	860	844
2	Payung Sekaki	121	122	262	272

3	Bukit Raya	108	112	320	321
4	Marpoyan Damai	195	165	479	520
5	Tenayan Raya	194	190	453	447
6	Limapuluh	47	56	63	78
7	Sail	19	21	50	69
8	Pekanbaru Kota	29	19	28	31
9	Sukajadi	50	51	98	94
10	Senapelan	49	37	48	85
11	Rumbai	79	99	211	225
12	Rumbai Pesisir	90	90	138	155
	Jumlah	1220	1884	3010	3141

Sumber: Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru

Berdasarkan tabel di atas pendatang yang pindah dari kota Pekanbaru sebanyak 1220 laki-laki dan 1884 perempuan sedangkan yang datang ke kota Pekanbaru sebanyak 3010 laki laki dan 3141 perempuan dari perbandingan di atas bisa disimpulkan bahwa kebanyakan pendatang yang datang ke kota pekanbaru daripada yang pindah dari kota Pekanbaru.

Berdasarkan latar belakang diatas ditemukan masalah pertumbuhan jumlah penduduk, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian di kota pekanbaru. Untuk itu penulis ingin mengetahui bagaimana Peran Pemerintah Dalam Pengendalian Penduduk Di Kota Pekanbaru.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena-fenomena dalam latar belakang yang telah dituliskan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini disusun sebagai berikut:

- A. Bagaimana Peran Pemerintah dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk di Kota Pekanbaru?
- B. Apa saja faktor-faktor yang menghambat Pemerintah dalam

melaksanakan pengendalian pertumbuhan penduduk di Kota Pekanbaru?

- C. Apakah peran pemerintah sangat membantu dalam pengendalian pertumbuhan penduduk di Kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui “Peran Pemerintah Dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk di Kota Pekanbaru”

2) Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai salah satu bahan perbandingan dari studi lebih lanjut dalam peningkatan dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan peran pemerintah dalam proses pengendalian pertumbuhan penduduk.
- b. Sebagai salah satu masukan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, diutamakan untuk memberikan masukan kepada Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan demi untuk mengatur SDM yang semakin meningkat.

D. Kerangka Teori

1. Peranan Pemerintah

Peranan pemerintah menurut Henry J. Abraham dapat juga dilihat dari tiga bentuk sebagai berikut:

- a. Mula-mula peranan pemerintah adalah sebagai penjaga keamanan dan ketertiban dalam perkembangan. Bahkan seringkali fungsi penarikan pajak tidak diabdikan bagi kepentingan rakyat. Ini adalah peranan pemerintah yang paling tradisional.
- b. Kemudian timbul pengertian tentang “*Service State*”, di mana peranan pemerintah merupakan abdi sosial dari

keperluan-keperluan yang perlu diatur dalam masyarakat. Hal ini juga didasari oleh banyak fikiran-fikiran mengenai “*Welfare State*” atau negara kesejahteraan.

- c. Tetapi kemudian terdapat pula suatu cara dalam pelaksanaan peranan pemerintah yang memberikan kepada pemerintah peranan sebagai *entrepreneur* atau pendorong inisiatif usaha pembaharuan dan pembangunan masyarakat. Pemerintah menjadi “*development agent*” atau unsur pendorong pembaharuan/pembangunan.

Tujuan pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal. Menurut Suhady dalam Riawan Pemerintah (*government*) ditinjau dari pengertiannya adalah “*The authoritative direction and administration of the affairs of men/women in a nation state, city, ect*”. Dalam bahasa Indonesia sebagai pengarah dan administrasi yang berwenang atas kegiatan masyarakat dalam sebuah Negara, kota dan sebagainya. Pemerintahan dapat juga diartikan sebagai “*The governing body of a nation, state, city, etc*” yaitu lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan Negara, Negara bagian, atau kota dan sebagainya. Pengertian pemerintah dilihat dari sifatnya yaitu pemerintah dalam arti luas meliputi seluruh kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif

2. Teori Peranan

Setiap manusia dalam kehidupannya masing-masing memiliki peran dan fungsi dalam menjalankan kehidupan. Dalam melaksanakan perannya, setiap manusia memiliki cara atau sikap

yang berbeda-beda. Hal ini sangat dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan sosialnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan pengertian peran sebagai berikut:

- a. Peran adalah pemain yang diandaikan dalam sandiwara maka ia adalah pemain sandiwara atau pemain utama;
- b. Peran adalah bagian yang dimainkan oleh seorang pemain dalam sandiwara, ia berusaha bermain dengan baik dalam semua peran yang diberikan;
- c. Peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.

3. Teori Pengendalian Pertumbuhan Penduduk

Menurut Marxist mengemukakan bahwa semakin banyak jumlah manusia semakin tinggi produksi yang di hasilkan. Sedangkan menurut Malthus (1766-1834) yang terkenal sebagai pelopor ilmu kependudukan yang lebih populer disebut dengan prinsip kependudukan (*The prinsiple of population*) yang menyatakan bahwa apabila tidak ada pembatasan akan berkembang biak dengan cepat dan memenuhi dengan cepat beberapa bagian dari permukaan bumi ini dan ia juga menyatakan bahwa manusia untuk hidup memerlukan bahan makanan sedangkan laju pertumbuhan bahan makanan jauh lebih lambat di banding dengan laju pertumbuhan penduduk dan apabila tidak ada pembatasan terhadap pertumbuhan penduduk maka manusia akan mengalami kekurangan bahan makanan sehingga inilah yang menjadi sumber kemelaratan dan kemiskinan manusia.

Pertumbuhan penduduk adalah perbandingan antara banyaknya pertambahan penduduk dengan jumlah penduduk pada tahun yang dibandingkan. Pertumbuhan penduduk sebenarnya merupakan keseimbangan dinamis antara dua

kekuatan yang menambah atau yang mengurangi jumlah penduduk. Perkembangan penduduk akan dipengaruhi oleh jumlah bayi yang lahir tetapi bersamaan pula akan dikurangi oleh jumlah kematian yang dapat terjadi pada semua golongan umur. Dalam konteks spasial mobilitas penduduk juga berpengaruh terhadap perubahan dalam jumlah penduduk, dimana imigrasi akan menambah jumlah penduduk dan emigrasi akan mengurangi jumlah penduduk dalam suatu wilayah.

4. Teori Kebijakan dan Kependudukan

Subarsono menulis dalam bukunya bahwa menurut Thomas Dye definisi kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Definisi tersebut mengandung makna bahwa kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah dan bukan swasta; kebijakan publik itu menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah.

Kebijakan publik adalah keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Sebagai suatu keputusan yang mengikat publik maka kebijakan publik haruslah dibuat oleh otoritas politik, yakni mereka yang menerima mandat dari publik atau orang banyak, umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat banyak dan demi kepentingan rakyat.

Teori kependudukan dikembangkan oleh dua faktor yang sangat dominan yaitu, pertama adalah meningkatnya pertumbuhan penduduk di negara-negara yang

sedang berkembang dan hal ini menyebabkan agar para ahli dapat memahami faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penduduk. Sedangkan faktor kedua adalah adanya masalah-masalah universal yang menyebabkan para ahli harus banyak mengembangkan dan menguasai kerangka teori untuk mengkaji lebih lanjut sejauh mana telah terjalin suatu hubungan antara penduduk dengan perkembangan ekonomi dan sosial.

E. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah sebuah pendekatan yang diselenggarakan dalam *setting* alamiah, peneliti sebagai instrument pengumpul data, menggunakan analisis induktif dan berfokus pada makna menurut perspektif partisipan. Secara garis besar, pengertian penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Sedangkan menurut Moleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll. Secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

2) Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Pekanbaru dengan lokasi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru, yang merupakan pelaksana pengendalian laju pertumbuhan penduduk di Kota Pekanbaru

3) Teknik Pengumpulan Data

1. Pengamatan (Observasi)

Pengamatan (Observasi) yaitu pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti dengan cara turun langsung ke lokasi penelitian, untuk melihat fakta-fakta yang terjadi di lokasi penelitian. Pengamatan dilakukan sejak awal penelitian dengan mengamati keadaan fisik lingkungan maupun diluar lingkungan itu sendiri. Metode ini digunakan untuk memperoleh data atau informasi yang lebih lengkap, lebih mendalam dan terperinci. Data dan informasi yang diperoleh melalui pengamatan ini selanjutnya dituangkan dalam tulisan.

2. Interview (Wawancara)

Wawancara menurut Moleong adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh 2 pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Dalam Wawancara, peneliti menggali sebanyak mungkin data yang terkait masalah subyek

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi ini merupakan metode bantu dalam upaya memperoleh data. Kejadian-kejadian atau peristiwa tertentu yang dapat dijadikan atau dipakai untuk menjelaskan kondisi didokumentasikan oleh peneliti. Dalam hal ini menggunakan dokumen terdahulu misalnya berupa foto-foto kegiatan, catatan kegiatan dan berbagai informasi yang dipergunakan sebagai pendukung hasil penelitian.

4) Sumber Data

1. Informan Penelitian

Pemilihan informan penelitian ini dilakukan dengan

Teknik *Purposive Sampling* yaitu pengambilan informan yang dipilih berdasarkan kriteria-kriteria atau ciri-ciri khusus yang sesuai dan memiliki kompetensi. Adapun informan dalam penelitian adalah:

- a) Kepala Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru.
- b) Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- c) Seksi Pengendalian Penduduk.
- d) Seksi Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi
- e) Seksi Kesertaan Keluarga

2. Dokumen

Dokumen dapat dibedakan menjadi dokumen prime, jika dokumen ini ditulis oleh orang yang langsung atau mengalami peristiwa, dan dokumen sekunder, jika peristiwa dilaporkan kepada orang lain yang selanjutnya ditulis oleh orang ini, Dokumen yang dimaksud ialah sebagai sumber data yang dapat berbentuk surat-surat dan dokumen lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

3. Buku

Buku yang dijadikan referensi ialah buku yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

4. Jurnal dan Skripsi

Skripsi dan jurnal yang dijadikan referensi adalah skripsi dan jurnal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

5) Jenis Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil pengamatan dan wawancara. Data tersebut yang diperoleh langsung dari informan di lokasi penelitian yang

menjadi subyek penelitian oleh peneliti, berupa informasi yang relevan dengan masalah-masalah yang sudah dirumuskan dalam penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pihak pengumpul data primer ataupun pihak lain. Data ini diperoleh melalui dokumen organisasi meliputi profil organisasi, struktur organisasi dan studi dokumentasi yang diperoleh dari buku, jurnal, majalah, dan internet yang dapat menjadi referensi bagi penelitian. Data sekunder yang diperoleh pada penelitian ini, antara lain:

- a. Laporan program yang dilaksanakan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana dan Dinas Pengendalian Penduduk Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru.
- b. Profil Dinas Pengendalian Penduduk Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru
- c. Peraturan Gubernur Nomor No.75 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau

6) Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu data utama dan data pendukung. Data utama diperoleh melalui subjek penelitian, yaitu orang-orang yang terlibat langsung dalam kegiatan sebagai fokus penelitian. Sedangkan data pendukung bersumber dari dokumen-dokumen berupa catatan, rekaman, gambar, atau foto serta bahan-bahan lain yang dapat mendukung penelitian

ini. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah dalam bentuk kata-kata atau ucapan dari perilaku orang-orang yang diamati dalam penelitian ini. Sedangkan data tambahan adalah dalam bentuk non manusia. Menurut Lofland dalam Moleong, adapun langkah-langkah analisis data sebagai berikut:

a. Langkah pertama, mengolah data mempersiapkan data untuk dianalisis.

Langkah ini melibatkan transkripsi wawancara, men-*scanning* materi, mengetik data lapangan, atau memilah-milah dan menyusun data tersebut ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi, sehingga peneliti mendapatkan fakta dan data mengenai Peran Pemerintah dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk di Kota Pekanbaru.

b. Langkah kedua, membaca keseluruhan data.

Membaca keseluruhan data. Langkah pertama adalah membangun general sense atas informasi yang diperoleh dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan. Dalam hal ini, setelah mendapatkan data wawancara, lalu peneliti memeriksa Kembali mengenai data Peran Pemerintah dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk di Kota Pekanbaru.

c. Langkah ketiga, menganalisis lebih detail dengan meng-*coding* data.

Coding merupakan proses mengolah materi/informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memakainya.

d. Langkah keempat, menerapkan proses coding untuk mendeskripsikan setting, orang-orang, kategori-kategori, dan tema-tema yang dianalisis. Deskripsi ini melibatkan

usaha penyampaian informasi secara detail mengenai orang-orang, lokasi, atau peristiwa.

- e. Langkah kelima, menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema ini akan disajikan kembali dalam narasi/laporan kualitatif. Setelah data hasil wawancara di dapat, peneliti membuat sebuah laporan yang dideskripsikan secara mendetail.
- f. Langkah terakhir, menginterpretasi atau memaknai data. Interpretasi atau pemaknaan ini juga bisa berupa pertanyaan-pertanyaan baru yang perlu dijawab selanjutnya, pertanyaan yang muncul dari data dan analisis Peran Pemerintah dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk di Kota Pekanbaru, bukan dari hasil ramalan peneliti. Pengendalian Pertumbuhan Penduduk di Kota Pekanbaru, bukan dari hasil ramalan peneliti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Pemerintah Dalam Pengendalian Penduduk Di Kota Pekanbaru

Indonesia merupakan negara kepulauan Indonesia adalah negara berpenduduk terpadat nomor empat di dunia. Komposisi etnis di Indonesia amat bervariasi karena negeri ini memiliki ratusan 141 ragam suku dan budaya. Meskipun demikian, lebih dari separuh jumlah penduduk Indonesia didominasi oleh dua suku terbesar. Bagian ini membahas struktur dan ciri khas penduduk Indonesia. Dua suku terbesar ini adalah Jawa (41 persen dari total populasi) dan suku Sunda (15 persen dari total populasi).

Dalam penelitian ini penulis mengamati tentang peranan pemerintah dalam pengendalian penduduk di Kota Pekanbaru, yang dimana penelitian ini mengambil fokus kepada 3 variabel bebas yang menerangkan peranan pemerintah, yaitu

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru. Variabel tersebut adalah Peranan Pemerintah, Pengendalian Pertumbuhan Penduduk, dan Demografi.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 terjadi perubahan kewenangan pada pemerintah daerah. Kepada pemerintah daerah diberikan keleluasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup seluruh bidang pemerintahan, kecuali bidang-bidang yang berdasar Undang-Undang telah ditetapkan sebagai kewenangan pusat. Keleluasaan otonomi ini mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraan pemerintahan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi. Konsekuensi dari kebijakan tersebut adalah kewenangan pusat termasuk program KB Nasional, pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota. Hal ini ditunjukkan dengan adanya penyerahan P3D (Personal Pembiayaan, Perlengkapan dan Dokumentasi) BKKBN Kabupaten/Kota oleh pemerintah pusat kepada pemerintah kabupaten/ kota.

Daerah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pengendalian penduduk, sesuai dengan UU Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga, yang dimana menjadi kewenangan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, hal ini sesuai dengan pendapat yang penulis dapatkan dari hasil wawancara sebagai berikut:

“Dinas dalam hal ini bekerja sama dengan pemerintah pusat untuk pengendalian penduduk sesuai dengan amanat undang-undang yang berlaku, menjadi tanggung jawab kedua belah pihak dalam pengendalian penduduk dan keluarga berencana, ”(Wawancara dengan Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Bapak Doni Sali Irwan. SH, MH).

Hal ini sejalan dengan UU Kependudukan, dalam UU tersebut menerangkan bahwa pembangunan nasional

mencakup semua dimensi dan aspek kehidupan termasuk perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan penduduk sebagai modal dasar dan faktor dominan pembangunan harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan karena jumlah penduduk yang besar dengan kualitas rendah dan pertumbuhan yang cepat akan memperlambat tercapainya kondisi yang ideal antara kuantitas dan kualitas penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Selain hal tersebut penulis juga mendapati dari hasil wawancara bahwa program yang dilakukan oleh daerah, berasal dari pemerintah pusat yaitu sebagai berikut:

“Tanggung jawab kedua belah pihak yaitu pemerintah daerah dan nasional dalam pengendalian penduduk berbentuk program yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat ke daerah, dan kebijakan yang dilaksanakan juga mengacu kebijakan pusat, program-program yang kami laksanakan berdasarkan pemerintah pusat seperti program keluarga berencana, menjarak usia perkawinan dan program dua (2) anak lebih sehat dahsyat, ” (Wawancara dengan Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Bapak Doni Sali Irwan. SH, MH).

Program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah tersebut sesuai dengan yang dikatakan oleh beliau melalui program terpusat yang akan diselenggarakan oleh pemerintah daerah, Ada beberapa program yang sering dilaksanakan oleh BPPKB yaitu antara lain program (KKBPK):

1. Kependudukan
2. Keluarga Berencana (KB)
3. Pembangunan Keluarga

Pelaksanaan program-program (KKBPK) di atas yang di laksanakan oleh BPPKB yaitu di lakukan oleh 4 bidang terkait :

1. Bidang Penyuluhan
2. Bidang Keluarga Berencana
3. Bidang K3 (Ketahanan Kesejahteraan Keluarga)
4. Pendataan.

Untuk mendukung program-program dari BPPKB dibutuhkan data tentang penduduk Kota Pekanbaru yaitu berupa hasil sensus yang telah dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dalam rentang waktu 10 tahun sekali. BPS mempunyai 3 Kegiatan yang sering di lakukan pada tahun-tahun berikut:

1. Sensus Penduduk
Sensus penduduk di laksanakan 10 tahun sekali dalam tahun yang berakhir 0.
2. Sensus Pertanian
Sensus pertanian di laksanakan 10 sekali dalam tahun yang berakhir 3.
3. Sensus Ekonomi
Sensus ekonomi di laksanakan 10 tahun sekali dalam tahun yang berakhir 6.

Kegiatan Setiap Tahun yang telah dilakukan BPS antara Lain :

1. SUSENAS (Survei Ekonomi Nasional)
2. SAKERNAS (Survei Angkatan Kerja Nasional)
3. SUPAS (Survei Antar Penduduk)

Selain kegiatan di atas ada kegiatan yang di sebut kegiatan komplikasi produk administrasi yaitu mengambil data penduduk dari semua instansi lain yang ada di Kota Pekanbaru dan di sajikan dalam Publikasi Pekanbaru Dalam Angka. Dari program-program diatas perlu data penduduk dari instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dibentuk dengan Perda No 2 Tahun 2016 terbaru tentang Rukunisasi Perangkat daerah dengan Tugas sebagai Pelayan Administrasi Kependudukan Dan Administrasi Pencatatan Sipil.

Administrasi Kependudukan sendiri ada 3 yaitu :

1. Kartu Keluarga
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik

3. Mutasi Penduduk

Administrasi Pencatatan sipil ada 3 yaitu:

1. Akta Kelahiran
2. Akta Kematian
3. Akta Perkawinan

Ada Beberapa Program inti dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil antara lain :

1. Program Penataan Administrasi Kependudukan
2. Program Peningkatan Dan Pengembangan system pelaporan kinerja.

Kegiatan dari program-program diatas antara lain:

1. Percepatan Pelayanan Kartu Keluarga
2. Percepatan Pelayanan Kartu Kelahiran
3. Percepatan Pelayanan Kartu Elektronik

Program-program yang di lakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Mengalami Perubahan dalam kepemilikan kependudukan contohnya; dalam hal kepemilikan akta kelahiran dimana dulu Anak usia 0 – 18 Tahun yang memiliki akta kelahiran sebanyak (20%) dan sekarang 0 – 18 Tahun mencapai (56%). Sementara itu juga dalam pola pelayanan sudah lebih transparan karna di setiap momen pelayanan melakukan sosialisasi baik itu Formal maupun Non formal sehingga masyarakat merasa penting tentang kepemilikan identitas.

B. Faktor Penghambat Yang Dihadapi Pemerintah Dalam Menjalankan Program-Program Pengendalian laju Pertumbuhan Penduduk

Berikut akan dijelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) di Kota Pekanbaru sebagai berikut:

1. Pengetahuan Masyarakat

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi pengetahuan. Orang yang berpendidikan tinggi akan memberikan respon yang lebih rasional dari pada mereka yang berpendidikan rendah, lebih kreatif dan lebih terbuka terhadap usaha-usaha pembaharuan yang bersifat positif. Ia juga lebih dapat

menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan sosial, secara langsung maupun tidak langsung dalam hal ini program Keluarga Berencana. Pengetahuan KB secara umum diajarkan pada pendidikan formal di sekolah dalam mata pelajaran kesehatan, pendidikan kesejahteraan keluarga dan kependudukan. Semakin tinggi tingkat pendidikan pasangan yang ikut KB, semakin tinggi proporsi mereka yang mengetahui dan menggunakan alat kontrasepsi untuk membatasi jumlah anaknya dalam rangka mewujudkan keluarga berkualitas. Pengetahuan dapat membentuk keyakinan tertentu sehingga seseorang berperilaku sesuai keyakinan tersebut.

2. Sosial Budaya Masyarakat

Nilai budaya Masyarakat Kota Pekanbaru seperti pandangan terhadap banyak anak adalah banyak rejeki, preferensi jenis kelamin anak, dan pandangan agama yang dianut secara inferensi tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Adat kebiasaan atau adat dari masyarakat Kota Pekanbaru perlu diluruskan karena tidak banyak menguntungkan.

3. Timbulnya Rasa Pesimis

Rasa pesimis atau takut terhadap pemakaian alat kontrasepsi menjadikan pelaksanaan KB tidak optimal. Faktor penghambat ini datang dari masyarakat yang tergolong pasangan usia uubur yang mana sebelumnya sudah melakukan KB dan kemudian berhenti memakai dikarenakan ketidakcocokan akan suatu alat kontrasepsi. Hal tersebut yang menjadi penghambat pelaksanaan program KB di Kota Pekanbaru.

4. Faktor Ekonomi Masyarakat

Masyarakat dengan penghasilan cukup akan lebih mampu mengikuti program KB dari pada masyarakat yang tidak mampu, karena bagi masyarakat yang kurang mampu, KB bukan merupakan kebutuhan pokok. Biaya akan pemakaian alat kontrasepsi seperti

hanya alat kontrasepsi hormonal yaitu penggunaan implan/susuk serta untuk kategori non-hormonal seperti IUD, Vasektomi/Tubektomi memerlukan biaya yang cukup mahal sehingga masyarakat pada umumnya enggan melakukan KB karena faktor tersebut.

5. Penyuluhan Pada Masa Pandemi Covid-19

Merebaknya wabah Covid-19 di seluruh dunia termasuk Indonesia mempengaruhi berbagai aspek, tidak terkecuali pada pelayanan Program Keluarga Berencana yang dijalankan BKKBN mengalami hambatan, hal itu dituangkan dalam wawancara, yaitu sebagai berikut:

“Selama masa pandemi ini kami mengalami kendala dalam penyuluhan, dari bulan April hingga Juni pada awal pandemi penyuluhan kami tidak bisa melakukan tugasnya, barulah awal Juli kami bisa bergerak untuk melakukan penyuluhan”
(Wawancara dengan Seksi Informasi Hj Masfiani S.sos)

C. Peran Pemerintah Dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk

Pertambahan penduduk dapat menghambat perkembangan ekonomi. Pertambahan penduduk yang lebih tinggi dibandingkan pertambahan output akan menurunkan pendapatan per kapita. Pertambahan penduduk juga menghambat perkembangan ekonomi saat lapangan pekerjaan yang tersedia terbatas. Peningkatan jumlah penduduk tanpa diiringi peningkatan lapangan pekerjaan akan menyebabkan peningkatan jumlah pengangguran. Di samping itu sumber daya alam yang relatif terbatas dan cenderung tetap, bisa jadi tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan penduduk jika jumlah penduduk terus meningkat.

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 Pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi

dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peran Pemerintah Kota Pekanbaru juga tidak terlepas dari peran perangkat daerah dan hubungan antara dinas-dinas yang terkait yang mempunyai tugas pokoknya masing-masing. Pada masa sebelum otonomi disebut Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sering berjalannya otonomi daerah SKPD di ubah menjadi Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Penutup

A. Kesimpulan

1. Peranan pemerintah dalam hal ini Kota Pekanbaru melalui Disdalduk KB sudah baik, dikatakan demikian karena program-program yang dijalankan oleh Disdalduk KB telah bisa menekan pertumbuhan penduduk yang terjadi di Pekanbaru yang tidak sampai pada tiga (3) persen setahun, dikatakan lebih lanjut bahwa program-program yang dijalankan merupakan program pusat yang dimana penduduk merupakan tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah, bentuk-bentuk program yang dimiliki adalah Kampung KB, Penyuluhan Kontrasepsi, dan Dua Anak Lebih Sehat Dahsyat yang dicanangkan oleh pemerintah pusat melalui pemerintah daerah.
2. Pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Disdalduk KB dalam hal ini terhambat oleh berbagai macam faktor seperti pengetahuan masyarakat, sosial budaya, adanya rasa pesimis terhadap keberhasilan program KB, faktor ekonomi dan terakhir yaitu hal sekarang yang sedang menjadi masalah Bersama yaitu pandemi yang dirasakan hampir seluruh dunia, penyuluhan

merupakan ujung tombak Disdalduk KB dalam penyampaian program nasional, dan hambatan tersebut juga terkait dengan dokter dan bidan yang mengurangi pasien pada masa pandemi ini.

3. Peran pemerintah dalam menekan laju pertumbuhan penduduk cukup baik dalam pelaksanaannya, dapat dilihat dari lonjakan penduduk yang pada umumnya masyarakat kita tidak mempunyai anak yang banyak karena melalui program-program yang dilakukan oleh pemerintah, selain itu pemerintah walaupun tidak terjadi lonjakan penduduk namun tetap melaksanakan sosialisasi-sosialisasi, memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar dengan terkendalinya penduduk, maka sektor-sektor lainnya juga ikut terkendali

B. Saran

1. Kepada Disdalduk KB agar tetap mempertahankan kinerjanya dalam penyuluhan, meskipun terdapat hambatan dalam penyuluhan akibat dari pandemi yang berkepanjangan ini, namun apabila lebih baik lagi apabila Disdalduk KB mengubah pola penyuluhan menjadi daring dan menetapkan protokol Kesehatan kepada penyuluh yang memang diharuskan turun ke lapangan.
2. Kepada masyarakat agar dapat menerima penyuluhan yang diberikan Disdalduk KB pada masa pandemi ini, sehingga akan mencegah lonjakan penduduk yang dimana peraturan dan pemerintah tidak bisa untuk menampungnya, sehingga nanti akan berpengaruh terhadap penghasilan, lapangan kerja dan hal lain-lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Almanshur Fauzan, Ghony Djunaidi (2012). *Metodologi Penelitian*

kualitatif, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Bagoes Mantra, Ida, 2000. *Demografi Umum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Djauzi Moedzakir, M. (2010). *Metode Pembelajaran untuk Program-Program Pendidikan luar sekolah*. Penerbit: Universitas Negeri Malang

Komaruddin, (1994), *Ensiklopedia Manajemen, edisi keenam*. Jakarta: Bumi Aksara

Moleong, Lexy J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Nurul Zuriah, (2008). *Pendidikan Moral & Budi Pekerti Dalam Perspektif Perubahan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Poerwadaminta, W.J.S. (1995). *Kamus Umum bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Balai Pustaka

Sunarno, Siswanto. (2008). *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika Offset

Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Suharto, Edi. 2006. *Kebijakan Sosial*. Bandung

Siswanto, wahyudi. 2008. *Hukum Pemerintahan Daerah DI Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika Offset

Tjandra, Riawan. 2009. *Hukum Keuangan Negara, Cetakan Ke-II*. Jakarta: P.T. Gramedia Widiasarana

B. Peraturan Perundang Undangan

Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009
Tentang Perkembangan
Kependudukan dan Pembangunan
Keluarga

Peraturan Gubernur Riau No.75 Tahun
2016 Tentang Kedudukan
Susunan Organisasi Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Kependudukan, Pencatatan Sipil,
dan Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Provinsi
Riau

C. Website

<https://riau.antarane.ws.com/berita/119848/penduduk-pekanbaru-tiap-tahun-bertambah-hingga-406-persen>
diakses pada tanggal 10 agustus 2020
pukul 10.15 WIB

<http://disdukcapildaldukkb.riau.go.id/opd>
diakses pada tanggal 10 agustus
2020 pukul 11.30 WIB

<https://pekanbarukota.bps.go.id/publikasi.html>
Diakses pada tanggal 11 agustus
Pukul 09.50 WIB

<http://kampungkb.bkkbn.go.id/profile/14103>
Diakses pada tanggal 14
september pukul 12.44 WIB

<https://www.ranahriau.com/berita-2170-sejarah-dan-budaya-asli-pekanbaru.html>
diakses pada
tanggal 8 Februari 2021